



XX
Ilmu Pemerintahan
FISIP - UNTIRTA



CITIZENSHIP IN INDONESIA:

Laku Pikir Praktik Kewargaan
dan Politik Lingkungan
pada Era Demokrasi Digital

EDITOR

Yeby Ma'asan Mayrudin
Wahyu Kartiko Utami
Peri Irawan

CITIZENSHIP IN INDONESIA: Laku Pikir Praktik Kewargaan dan Politik Lingkungan pada Era Demokrasi Digital

Ika Arinia Indriyany, Yeby Ma'asan
Mayrudin, Moh. Rizky Godjali, Wahyu Kartiko Utami,
M. Dian Hikmawan, Gilang Ramadhan, Bayu Nurrohman,
Mahpudin, Shanty Kartika Dewi, Anis Fuad, Elly Nurlia,
Uliviana Restu Handaningtias, Renata Maharani, Selvi Sulistiani,
Valerie Amalinda, Sarah Putri Nabila, Endri Rohendri,
Peri Irawan, Tryanita Berlianty, Putri Setya Ningrum,
Putri Mega Meilani, Nazira Aulia Az-Zahra, Mia Annisa
Camia, Nia Qurrotul'ain, Mochamad Adam Novianto,
M. Fajar Aminnullah.

Penerbit :



CITIZENSHIP IN INDONESIA: Laku Pikir Praktik Kewargaan dan Politik Lingkungan pada Era Demokrasi Digital

ISBN : 978-623-5594-51-4

Penulis : Ika Arinia Indriyany, Yeby Ma'asan Mayrudin, Moh. Rizky Godjali,
Wahyu Kartiko Utami, M. Dian Hikmawan, Gilang Ramadhan, Bayu
Nurrohman, Mahpudin, Shanty Kartika Dewi, Anis Fuad, Elly
Nurlia, Uliviana Restu Handaningtias, Renata Maharani, Selvi
Sulistiani, Valerie Amalinda, Sarah Putri Nabila, Endri Rohendri,
Peri Irawan, Tryanita Berlianty, Putri Setya Ningrum, Putri Mega
Meilani, Nazira Aulia Az-Zahra, Mia Annisa Camia, Nia
Qurrotul'ain, Mochamad Adam Novianto, M. Fajar Aminnullah.

Editor : Yeby Ma'asan Mayrudin, Wahyu Kartiko Utami,
Peri Irawan
Layout & Cover : Tim Penulis

Cetakan Pertama, Juni 2023

Diterbitkan oleh :

CV. Media Karya Kreatif
Jl. Yudistira 17, Kavling Citra Pelamunan Indah,
Kramatwatu, Serang – Banten
Email : mediakarya.publishing@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Realisasi Collaborative Governance sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan di Banten	1
Pendahuluan	1
<i>Integrated Participatory Development & Management of Irrigation Program</i>	3
Pelaksanaan IPDMIP Kabupaten Serang	5
Social Networking	6
Penutup	7
Daftar Pustaka	7
Diskursus Politik Lingkungan: Telaah atas Perjanjian Paris dan Perubahan Iklim di Indonesia	10
Pendahuluan	10
Perjanjian Paris	11
Perubahan Iklim di Indonesia	13
Penutup	15
Daftar Pustaka	16
Citizenship dan HAM serta Konsolidasi Demokrasi: Tantangan dan Peluang	17
Pendahuluan	17
Tantangan HAM dan Konsolidasi Demokrasi	19
Peluang HAM dan Konsolidasi Demokrasi	21
Penutup	22
Daftar Pustaka	23
Problematika Demokratisasi di Era <i>Society 5.0</i>: Polemik UU ITE, Kebebasan Berekspresi, dan Aksesibilitas Warga dalam Pelayanan Publik	24
Pendahuluan	24
Polemik UU ITE	26
Kebebasan Berekspresi	27
Aksesibilitas Warga Dalam Pelayanan Publik	31
Penutup	33
Daftar Pustaka	33

<i>Active Citizenship</i> di Era Demokrasi Digital bagi Generasi Milenial: Hambatan dan Peluang	35
Pendahuluan	35
Pengembangan <i>Leadership</i> dan <i>Active Citizenship</i> Generasi Milenial di Era Digital	39
Penutup	46
Daftar Pustaka	47
Kajian Gender:	
Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dalam Lingkungan Kerja	48
Pendahuluan	48
Diskriminasi Gender	50
Konsepsi Gender	51
Kesetaraan Gender	52
Diskriminasi Perempuan dalam Lingkungan Kerja	53
Penutup	56
Daftar Pustaka	57
Problematisasi Penanganan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu di Indonesia	58
Pendahuluan	58
Bawaslu dan Pelanggaran Pemilu	59
Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi	61
Urgensi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM	65
Tantangan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Indonesia	66
Penutup	67
Daftar Pustaka	67
Peluang dan Tantangan Demokrasi Digital di Indonesia	70
Pendahuluan	70
Diskursus Demokrasi Digital	71
Tantangan dan Peluang Demokrasi Digital	73
Penutup	75
Daftar Pustaka	75
Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Optimalisasi Aksesibilitas Masyarakat	77
Pendahuluan	77
Kepemimpinan Digital	81
Daftar Pustaka	82
Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik	84

Pendahuluan	84
Kepemimpinan Perempuan	87
Tantangan Kepemimpinan Perempuan	88
Kepemimpinan Perempuan di Provinsi Banten	88
Daftar Pustaka	91
<i>Community Engagement</i> dalam Pelaksanaan PATBM Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten	94
Pendahuluan	94
Diskursus Teori Demokrasi-Liberal	94
Hadirnya Partisipasi Publik	95
Tipe Partisipasi Publik	95
Diskursus Community Engagement	95
Domain Keterlibatan	96
Faktor-Faktor Partisipasi Publik	96
Manfaat dan Dampak	97
Efektivitas dan Batas	97
Pelaksanaan PATBM di Kabupaten Serang	98
Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM	101
Penutup	103
Daftar Pustaka	104
<i>Balancing Allies and Adversaries: Studi tentang Hubungan Diplomatik Indonesia-Selandia Baru</i>	106
Pendahuluan	106
Kajian Teoritis	110
Diplomatic Signaling in Multistate Context	110
Model of Multy-Party Negotiation	110
Model of Multy-Party Negotiation when Signaling is Possible	111
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Indonesia-Selandia Baru	111
<i>Joint Ministerial Commision</i> (JMC) Indonesia-Selandia Baru	111
Comprehensive Partnership Indonesia-Selandia Baru	112
Kerja Sama Indonesia-Selandia Baru dalam Bentuk <i>Comprehensif Partnership</i>	112
Sikap Indonesia terhadap Negara lain di Kawasan ASEAN dan Pasifik	116

Penutup	120
Diskusi/Implementasi	121
Saran	122
Daftar Pustaka	123
Profil Tim Penulis	127

Peluang dan Tantangan Demokrasi Digital di Indonesia

Anis Fuad, Peri Irawan, Nazira Aulia Az-Zahra

Pendahuluan

Internet menjadi instrumen kuat dalam abad ke-21 yang telah merambah ke seluruh dimensi kehidupan manusia (Damar, 2016; Absor, 2020; Huda & Rodin, 2020; Huda & Rodin, 2020; Wulan et al., 2018) untuk meningkatkan transparansi dalam mengawasi kinerja pemerintah, memberi akses pada informasi, dan sebagai alat untuk memudahkan masyarakat dalam membangun demokrasi di Indonesia dengan lebih mudah. Melihat kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari teknologi menjadikan maraknya penggunaan teknologi, sejak bangun pagi sampai dengan tidur kembali, manusia memiliki ketergantungan dengan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Kemajuan TIK di Indonesia menjadikan sebagian besar manusia menganggap bahwa internet bukanlah sebagai suatu kemewahan melainkan suatu kebutuhan.

Penggunaan TIK di Indonesia secara terus menerus meningkat, dimana berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 menunjukkan, penetrasi masyarakat Indonesia terhadap internet mencapai 143, 26 juta jiwa. Dari angka ini sebanyak 87,13 hingga 89,35 persen di antaranya menggunakan media sosial *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram* masing-masing sebesar 130 juta, 99,2 juta, dan 53 juta jiwa. Sebanyak 75 persen pengguna internet tersebut adalah penduduk Indonesia yang berusia antara 13 hingga 18 tahun (Permadi, 2018). Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan TIK akan memberikan pengaruh baik dan buruknya terhadap kondisi berbangsa dan bernegara, mulai dari dinamika politik, ujaran kebencian, demokrasi digital, gerakan politik, dan banyak lainnya. Hal demikian terjadi di belahan dunia seperti gerakan Arab *Spring* yang dimulai di Tunisia yang memainkan gerakan sosial melalui teknologi, contohnya kelompok teknologi pembebas yang memainkan peranan penting dalam menumbangkan rezim otoriter Presiden Zen el-Abedine Ben Ali di Tunisia (Juniarto, 2016).

Sejak jatuhnya orde baru konstelasi politik Indonesia para aktor politik baik berbasis negara maupun non-negara memperluas lapangan berdemokrasi yang ditandai dengan memanfaatkan TIK dalam memainkan perpolitikan di Indonesia. Dalam perkembangannya dalam

lima tahun terakhir dinamika politik dengan kerangka *platform* digital, hal tersebut menandakan adanya pengaruh TIK dalam ruang demokrasi. Perangkat TIK makin memertegas pentingnya peranan demokrasi digital (*digital democracy*) dalam dinamika politik di Indonesia. Dinamika dimaksud memerukuh bangunan politik antara dunia nyata (*real politics*) dan dunia maya (*virtuel politics*) (Sardini, 2017).

Demokrasi digital mewarnai pada pemilu 2014 di Indonesia yang memanfaatkan internet untuk berdemokrasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, dimana saat itu terdapat inovasi berupa *platform*, *website*, dan *mobile apps* yang digunakan untuk kepentingan pemilu. Sehingga peranan internet sangat signifikan jika melihat situasi dan kondisi saat ini, selain dari itu ketika di tahun 2020 dunia dilanda *Covid-19* salah satunya di Indonesia, dimana pada pilkada 2020 yang dilaksanakan secara serentak banyak menggunakan *platform* digital yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut sejalan dengan perkembangan penggunaan internet yang bukan saja terjadi di Indonesia melainkan di seluruh belahan dunia yang digunakan bukan untuk sekedar berpendapat secara bebas, tetapi juga mampu menyuarakan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peranan untuk memenuhi hak warga atas kebenaran (Juniarto, 2016).

Selain dari memberikan banyak manfaat seperti adanya penghematan biaya, peningkatan layanan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data, pelayanan dengan cepat dan efisien. Keberadaan demokrasi digital juga terdapat banyak tantangan baik yang terjadi di pemerintahan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lalu lintas maupun di keamanan. Adapun tantangan terjadi baik di internal maupun eksternal pemerintahan, seperti adanya tenaga kerja yang tidak terampil atau tidak disiplin, lemahnya regulasi yang mengatur terhadap etika publik dalam demokrasi digital, dan tantangan-tantangan lainnya. Sehingga tulisan ini akan mengeksplor lebih jauh tentang peluang dan tantangan demokrasi digital di Indonesia yang memfokuskan dalam birokrasi pemerintahan.

Diskursus Demokrasi Digital

Demokrasi digital menjadi salah satu cara pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelaksanaan proses bisnisnya, meningkatkan partisipasi warga, hingga memperkuat kepercayaan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi. Dalam praktik-praktik

pelayanan publik kontemporer, revolusi digital turut mempengaruhi bagaimana pelayanan publik diselenggarakan. Termasuk diantaranya penggunaan platform digital dalam mengakselerasi pelayanan, agar lebih mudah diakses dan dapat diakses dengan lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik juga mampu meningkatkan partisipasi publik.

Kehadiran internet secara masif selanjutnya menghadirkan kondisi yang kita kenal sebagai revolusi digital. Perubahan teknologi digital ini terjadi di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemerintah. Terhadap berbagai perubahan tersebut, pemerintah mau tak mau turut serta beradaptasi. Salah satu bentuk adaptasi tersebut terlihat dalam bentuk penggunaan berbagai platform digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Platform digital mampu meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik dan proses-proses manajemen pemerintahan serta melahirkan inovasi-inovasi di berbagai tingkat pemerintahan.

Peluang dan tantangan demokrasi digital di Indonesia menjadi upaya untuk memberikan pemahaman bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dalam ruang lingkup demokrasi digital di Indonesia. Karena sudah menjadi interaksi sosial semua kalangan mengakses dengan mudah, selain itu demokrasi digital tentu saja memberikan dua dampak positif dan negatif, sebagaimana dapat dilihat adanya demokrasi digital pada masa sekarang ini memperlihatkan *attitude netizen* bangsa yang kurang baik di mata bangsa lain, tetapi selain itu memberikan satu manfaat agar aspirasi-aspirasi masyarakat bisa didengar oleh pemerintah dengan cepat. Maka dalam konteks peluang dan tantangan demokrasi negara perlu hadir untuk menciptakan instrumen aturan yang berpijak kepada kebijaksanaan, bukan kepada mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu diperlukan kembali pada usaha memperbanyak literasi digital untuk menciptakan ruang media sosial yang sehat dan produktif bagi segenap elemen bangsa dan bernegara.

Para era revolusi industri keempat, digital memainkan peran penting. Dalam satu sisi menggantikan peran-peran manusia, di sisi yang lain meluaskan peran manusia dalam relasionalitasnya dengan urusan-urusan politik. Pesan-pesan politik tidak lagi memerlukan kehadiran para pelaku politik secara fisik ke dalam arena-arena politik. Seorang pelaku politik dapat menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik melalui perangkat-perangkat TIK. Sebaliknya masyarakat juga dapat merespon

pesan-pesan yang disampaikan para pelaku politik secara langsung atau interaktif. Topik yang dibincangkan di antara keduanya, memicu perdebatan yang kadang dalam batas-batas norma sosial yang berlaku, namun tidak menutup kemungkinan berjalan ke luar dari norma sosial, norma agama, dan norma hukum. Sudah menjadi pengetahuan umum, konten-konten yang diunggah dan dibincangkan dalam perdebatan mengandung unsur kebencian, terkategori komunalisme suku, agama, ras, dan antargolongan.

Dalam kehidupan politik, terjadi perubahan yang cepat dan mendasar dalam hubungan antar-para pelaku politik. Sebelum memasuki revolusi industri keempat, batas-batas tradisional memainkan peranan yang sangat penting. Hadirnya TIK mengaburkan antara ruang privat dan publik secara simultan, sehingga berakibat dan mengancam hak-hak pribadi di antara para pelaku politik dimaksud. Perubahan besar pada kemajuan TIK dalam masyarakat manusia adalah dalam cara berinteraksi antar-kelompok masyarakat melalui media sosial, yang sebelumnya tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Jenis teknologi ini disebut “Inovasi disruptif” (*Disruptive Innovation*), yakni sejenis teknologi yang memiliki potensi untuk mengubah cara kehidupan manusia, kecenderungan pasar, serta aspek-aspek lain, termasuk di dalamnya transportasi dan komunikasi.

Tantangan dan Peluang Demokrasi Digital

Pada era demokrasi digital, rakyat adalah sebagai objek sekaligus subjek. Sebagai objek, para pengguna perangkat-perangkat TIK, adalah konsumen demokrasi yang baik. Mereka hanya penikmat dari konten-konten yang diteruskan atau diunggah oleh para pemrodok konten dimaksud. Para pemrodok adalah pemilih sumber-sumber material di wilayah kekuasaan yang bermaksud dua motif, yakni bila konten memuat pesan-pesan positif, maka persepsi kepada pihak yang disasar juga akan membangun persepsi positif, dan sebaliknya, apabila mereka memrodok konten-konten negatif, maka kepada pihak yang disasar (penguasa) persepsi yang terbangun adalah positif adanya. Perubahan yang begitu cepat dan menyeluruh dalam era demokrasi digital ini merupakan momentum besar yang dapat dijadikan dorongan perubahan-perubahan politik.

Peluang terbesar praktik demokrasi digital (*digital democracy*) adalah adanya perluasan ruang-ruang interaksi di antara para pemangku

kepentingan dalam demokrasi. Dalam pengertian demokrasi “Tradisional” selama ini, konsep demokrasi membuka ruang-ruang dialog antar-pelaku demokrasi. Tiap pihak dalam pemangku kepentingan demokrasi tersebut, dapat menyampaikan pendapat ke ranah publik tanpa khawatir oleh risiko-risiko politik yang mungkin terjadi, termasuk risiko dari perasaan takut dan bentuk-bentuk paksaan lainnya. Demokrasi digital memiliki peran untuk memerluas jangkauan ruang-ruang partisipasi publik. Nilai tambah dari praktik demokrasi digital adalah perwujudan kesetaraan tiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Satu manfaat nyata dari kemajuan TIK dalam politik adalah perluasan fungsi-fungsi sosial dari para pelaku politik. Hubungan antara warga negara dan warga negara lainnya lebih mudah. Komunikasi politik tidak perlu lagi, dalam batas yang dimungkinkan menurut aturan dan tata krama politik, dimediasi oleh instansi-institusi politik.

Peluang dari demokrasi digital adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi digital sangat efisien, karena tiap orang yang hendak berpartisipasi dapat dilakukan secara langsung, melalui platform TIK. Pemanfaatan TIK dalam demokrasi, menghilangkan faktor-faktor teknik yang bagi sebagian orang atau kelompok tertentu menghambat perwujudan partisipasi politik warga negara, di sinilah demokrasi digital membuka peluang menginstitutionalisasi secara politik.

Tantangan utama demokrasi digital adalah bagaimana cara mengelola, menyikapi, dan mengatasi dampak-dampak negatif dari pemanfaatan TIK dalam ranah publik. Pada dasarnya, demokrasi digital berada pada posisi netral dan imparial. Penggunaan perangkat TIK dalam ranah publik, tidak akan memunculkan permasalahan apapun, dan selama pemanfaatan sebagian atau seluruh perangkat TIK sesuai keadaban sosial dan politik, yang justru memuliakan demokrasi digital. Tantangan utama demokrasi digital, karena itu, terletak pada bagaimana cara bermainnya para pemain politik. Selama mereka bermain politik dalam koridor norma sosial, norma agama, dan norma hukum, justru mendorong pemuliaan kehidupan demokrasi sipil.

Tantangan terbesar dari kesenjangan digital adalah kesenjangan dalam demokrasi. Daerah dengan akses internet yang lebih rendah, bahkan menjadi tempat yang subur untuk tidak terkontrol atau kurang maksimal terkontrolnya operasi kekuasaan politik yang dijalankan para elite politik setempat. Demokrasi menjadi rapuh/rentah, dan peran-

peran otokratis dapat dengan mudah dijalankan para penguasa lokal. Asumsi yang dibangun adalah bahwa kesenjangan digital memiliki implikasi terhadap kerentanan/kerapuhan demokrasi, sedangkan kesetaraan politik adalah potensialitas yang paling berbahaya terhadap demokrasi. Pada saat bersamaan, praktik demokrasi juga menghadapi tantangan-tantangan yang justru lebih kuat dari kapasitas dinamika politik dalam demokrasi yang ada. Tantangan-tantangan tersebut dalam bentuk tiadanya, untuk tidak menyatakan lemahnya, kontrol-kontrol baik secara endogen dari dalam pikiran dan tindakan para pelaku demokrasi sendiri, maupun dari faktor eksogen yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum.

Penutup

Peluang terbesar praktik demokrasi digital (digital democracy) adalah adanya perluasan ruang-ruang interaksi di antara para pemangku kepentingan dalam demokrasi. Dalam pengertian demokrasi “tradisional” selama ini, konsep demokrasi membuka ruang-ruang dialog antar-pelaku demokrasi. Peluang dari demokrasi digital adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi digital sangat efisien, karena tiap orang yang hendak berpartisipasi dapat dilakukan secara langsung, melalui platform TIK.

Tantangan terbesar dari kesenjangan digital adalah kesenjangan dalam demokrasi. Demokrasi menjadi rapuh atau rentah, dan peran-peran otokratis dapat dengan mudah dijalankan para penguasa lokal. Asumsi yang dibangun adalah bahwa kesenjangan digital memiliki implikasi terhadap kerentanan/kerapuhan demokrasi, sedangkan kesetaraan politik adalah potensialitas yang paling berbahaya terhadap demokrasi.

Daftar Pustaka

- Absor, N. F. (2020). Pembelajaran sejarah abad 21: tantangan dan peluang dalam menghadapi pandemi covid-19. *Journal of History Education*, 2(1), 30–35.
- Dedy Permadi. (2018). *Darurat Literasi Digital Keluarga*. Kompas. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/080600465/mengenal-program-literasi-digital-nasional-dan-cara-mengaksesnya?page=all>

- Huda, M., & Rodin, R. (2020). Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Tool Sistem Manajemen Sekolah Abad 21. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 4(2), 201–214.
- Juniarto Damar. (2016). *Demokrasi Digital dalam Pilkada Serentak 2017*. <http://www.bubu.com/kampus>
- Sardini, N. H. (2017). Sardini_2017. *Waste Management*, 68, XXX. [https://doi.org/10.1016/s0956-053x\(17\)30669-4](https://doi.org/10.1016/s0956-053x(17)30669-4)
- Wulan, A. R., Isnaeni, A., & Solihat, R. (2018). Penggunaan Asesmen Elektronik Berbasis Edmodo Sebagai Assessment for Learning Keterampilan Abad 21. *Indonesian Journal of Educational Assessment-Vol*, 2(1), 1–10.